

Laporan Keuangan Lembaga Sensor Film

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

Gedung F, Kemendikbud Ristek Lantai 6

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

Laman: *www.lsf.go.id/* e-mail: *sekretariat@lsf.go.id*

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Lembaga Sensor Film yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2024
Sekretaris LSF,

M. Sanggupri, S.Sos., M.Hum
NIP 197005021995121001



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Lembaga Sensor Film adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Sensor Film mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah- kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Lembaga Sensor Film. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Jakarta, Mei 2024

Sekretaris LSF,

M. Sanggupri, S.Sos., M.Hum

NIP 197005021995121001

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	ii
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	4
II. NERACA	5
III. LAPORAN OPERASIONAL	6
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	7
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	8
A. Penjelasan Umum.....	8
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	30
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	40
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	23
Tabel 2. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per Jenis Pendapatan	23
<i>Tabel 3. Perbandingan Realisasi Pendapatan.....</i>	<i>24</i>
Tabel 4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja	24
Tabel 5. Perbandingan Rincian Belanja Pegawai	26
Tabel 6. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai	26
Tabel 7. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang.....	27
Tabel 8. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang	27
Tabel 9. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal.....	28
Tabel 10. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Moda	28
Tabel 11. Rincian Aset Lancar	30
Tabel 12. Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran Setelah tanggal pelaporan.....	31
Tabel 13. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	31
Tabel 14. Penyelesaian Kas Lainnya dan Setara Kas	32
Tabel 15. Rincian Persediaan	33
Tabel 16. Rincian Aset Tetap.....	33
Tabel 17. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	34
Tabel 18. Mutasi Peralatan dan Mesin	34
Tabel 19. Mutasi Aset Tetap Lainnya.....	35
Tabel 20. Rincian Aset Lainnya	36
Tabel 21. Mutasi Aset Tak Berwujud	36
Tabel 22. Rincian Aset Tak Berwujud.....	37
Tabel 23. Mutasi Aset Lain-Lain	37
Tabel 24. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset dan Amortisasi Lainnya.....	38
Tabel 25. Penyelesaian utang jangka pendek lainnya	39
Tabel 26. Ringkasan Perbandingan Laporan Operasional	40
Tabel 27. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak	41
Tabel 28. Rincian Beban Pegawai	42
Tabel 29. Rincian Beban Persediaan	43
Tabel 30. Rincian Beban Barang dan Jasa	44
Tabel 31. Rincian Beban Pemeliharaan	45
Tabel 32. Rincian Beban Perjalanan Dinas.....	46
Tabel 33. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	46
Tabel 34. Rincian Kegiatan Non Operasional.....	47

Tabel 35. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas 48

Tabel 36. Rincian Surplus (Defisit) LO 48

Tabel 37. Rincian Nilai Transaksi antar Entitas 49

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan yang dimaksud meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun secara berjenjang mulai dari tingkat UAKPA sampai dengan tingkat UAPA.

Laporan Keuangan Lembaga Sensor Film TA 2023 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 2,916,616,688,-

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 41.880.290.430,- atau mencapai 98% dari alokasi anggaran Rp. 42.902.457.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2023 dan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022. Jumlah Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 5,813,025,993,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 295,022,375,-. Aset Tetap sebesar Rp. 4,264,686,895,- dan Aset Lainnya sebesar Rp. 1,253,316,723,- Jumlah Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 27,544,358,-

Sedangkan Aset pada 31 Desember 2022 sebelumnya dicatat dan disajikan sebesar Rp. 3,896,117,580,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 804,140,895,-. Aset Tetap sebesar Rp. 2,226,222,587,- dan Aset Lainnya sebesar Rp. 865,754,098,- Jumlah Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 0,-

Jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp. 5,785,481,635,- yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 5,785,481,635,-. Sedangkan jumlah Ekuitas pada 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3,896,117,580

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan - LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit - LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan - LO untuk periode sampai dengan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 2,748,446,889,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 39,769,895,875,- sehingga terdapat Defisit dari kegiatan Operasional senilai Rp. (37,021,448,986),-. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp. (52,860,701),-. Sehingga Entitas mengalami Defisit LO sebesar Rp. (37,074,309,687),-

Sedangkan per 31 Desember 2022 adalah PNBPN sebesar Rp. 2,325,800,154,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 29,157,624,522,- sehingga terdapat Defisit dari kegiatan Operasional senilai Rp. (26,831,824,368),-. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan NonOperasional sebesar Rp. (0),-. Sehingga Entitas mengalami Defisit LO sebesar Rp. (26,831,824,368),-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal adalah sebesar Rp. 3,896,117,580,- dikurangi Defisit - LO sebesar Rp. (37,074,309,687),- kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 38,963,673,742,- terjadi

kenaikan/penurunan ekuitas Rp. 1,889,364,055,- sehingga Ekuitas entitas Per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. 5,785,481,635,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LEMBAGA SENSOR FILM LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023		%	31 DESEMBER 2022		%
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	
PENDAPATAN	B.1						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	-	2.916.616.688	0,00	-	2.325.800.154	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		-	2.916.616.688	0,00	-	2.325.800.154	0,00
BELANJA	B.2						
Belanja Pegawai	B.2.1	11.158.354.000	11.083.895.211	99,33	11.454.219.000	11.399.861.961	99,53
Belanja Barang	B.2.2	28.289.283.000	27.352.664.278	96,69	17.534.893.000	17.450.303.102	99,52
Belanja Modal	B.2.3	3.454.820.000	3.443.730.941	99,68	200.000.000	195.360.000	97,68
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	0,00	-	-	0,00
JUMLAH BELANJA		42.902.457.000	41.880.290.430	97,62	29.189.112.000	29.045.525.063	99,51

II. NERACA

LEMBAGA SENSOR FILM NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK/(TURUN) Rp	%
ASET					
ASET LANCAR	C.1				
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	27.544.358	-	27.544.358	0%
Persediaan	C.1.3	267.478.017	804.140.895	(536.662.878)	-67%
Jumlah Aset Lancar		295.022.375	804.140.895	(509.118.520)	-63%
ASET TETAP	C.2				
Peralatan dan Mesin	C.2.1	59.801.937.914	62.020.046.098	(2.218.108.184)	-4%
Aset Tetap Lainnya	C.2.2	758.769.274	559.469.274	199.300.000	36%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.3	(56.296.020.293)	(60.353.292.785)	4.057.272.492	-7%
Jumlah Aset Tetap		4.264.686.895	2.226.222.587	2.038.464.308	92%
ASET LAINNYA	C.3				
Aset Tidak Berwujud	C.3.1	1.482.639.223	1.095.929.098	386.710.125	35%
Aset Lain-Lain	C.3.2	6.134.317.725	1.080.466.725	5.053.851.000	468%
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(6.363.640.225)	(1.310.641.725)	(5.052.998.500)	386%
Jumlah Aset Lainnya		1.253.316.723	865.754.098	387.562.625	45%
JUMLAH ASET		5.813.025.993	3.896.117.580	1.916.908.413	49%
KEWAJIBAN	C.4.1				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4.1				
Utang jangka pendek lainnya	C.4.1	27.544.358	-	27.544.358	0%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		27.544.358	-	27.544.358	#DIV/0!
JUMLAH KEWAJIBAN		27.544.358	-	27.544.358	#DIV/0!
EKUITAS					
Ekuitas		5.785.481.635	3.896.117.580	1.889.364.055	48%
JUMLAH EKUITAS		5.785.481.635	3.896.117.580	1.889.364.055	48%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.813.025.993	3.896.117.580	1.916.908.413	49%

III. LAPORAN OPERASIONAL

LEMBAGA SENSOR FILM LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK/(TURUN) Rp	%
KEGIATAN OPERASIONAL	D.1				
PENDAPATAN	D.1.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1.1.1	2.748.446.889	2.325.800.154	422.646.735	18,17%
JUMLAH PENDAPATAN		2.748.446.889	2.325.800.154	422.646.735	18,17%
BEBAN	D.1.2				
Beban Pegawai	D.1.2.1	11.083.895.211	11.399.861.961	(315.966.750)	-2,77%
Beban Persediaan	D.1.2.2	860.282.849	189.146.360	671.136.489	354,82%
Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3	13.356.646.087	9.400.380.747	3.956.265.340	42,09%
Beban Pemeliharaan	D.1.2.4	2.529.367.920	1.473.688.925	1.055.678.995	71,64%
Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5	10.943.977.800	6.264.592.300	4.679.385.500	74,70%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.6	995.726.008	429.954.229	565.771.779	131,59%
JUMLAH BEBAN		39.769.895.875	29.157.624.522	10.612.271.353	36,40%
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(37.021.448.986)	(26.831.824.368)	(10.189.624.618)	37,98%
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.2				
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		168.169.799	-	168.169.799	0,00%
Defisit Penjualan Aset Nonlancar		(221.030.500)	-	(221.030.500)	#DIV/0!
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(52.860.701)	-	(52.860.701)	#DIV/0!
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(37.074.309.687)	(26.831.824.368)	(10.242.485.319)	38,17%
POS LUAR BIASA					
SURPLUS/DEFISIT LO		(37.074.309.687)	(26.831.824.368)	(10.242.485.319)	38,17%

Rupiah)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LEMBAGA SENSOR FILM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam
Rupiah)

URAIAN	CATATAN	JUMLAH		NAIK/(TURUN) RP	%
		31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022		
EKUITAS AWAL	E.1	3.896.117.580	-	3.896.117.580	#DIV/0!
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(37.074.309.687)	(26.831.824.368)	(10.242.485.319)	38,17%
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	38.963.673.742	30.727.941.948	8.235.731.794	26,80%
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	1.889.364.055	3.896.117.580	(2.006.753.525)	-51,51%
EKUITAS AKHIR	E.5	5.785.481.635	3.896.117.580	1.889.364.055	48,49%

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Umum

A.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

12. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2014 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2014 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual pada Laporan Keuangan;
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.
21. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-07/KN/2009 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara;

22. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-1/KN/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per- 07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Lembaga Sensor Film

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2014 tentang lembaga sensor film. Lembaga sensor film memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut:

1. Tugas (Pasal 6)

- a) Melakukan penyensoran film dan iklan film sebelum diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan
- b) Melakukan penelitian dan penilaian judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum.

2. Fungsi (Pasal 7)

- a) Perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran dan pertunjukan film dan iklan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia;
- b) Penyusunan pedoman penerbitan dan pembatalan surat tanda lulus sensor;
- c) Sosialisasi secara intensif pedoman dan kriteria sensor kepada pemilik film dan iklan film agar dapat menghasilkan film dan iklan film yang bermutu;
- d) Pemberian kemudahan masyarakat dalam memilih dan menikmati pertunjukan film dan iklan film yang bermutu serta memahami pengaruh film dan iklan film;

- e) Pembantuan pemilik film dan iklan film dalam memberi informasi yang benar dan lengkap kepada masyarakat agar dapat memilih dan menikmati film yang bermutu; dan
- f) Pemantauan apresiasi masyarakat terhadap film dan iklan film yang diedarkan, dipertunjukkan dan menganalisis hasil pemantauan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tugas penyensoran berikutnya dan/atau disampaikan kepada menteri sebagai bahan pengambilan kebijakan kearah pengembangan perfilman di indonesia.

3. Wewenang (Pasal 8)

- a) Penentuan penggolongan usia penonton;
- b) Pengembalian film dan iklan film yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran untuk diperbaiki oleh pemilik film dan iklan film
- c) Penyensoran ulang (re-censor) film dan iklan film yang sudah diperbaiki oleh pemilik film dan iklan film sesuai pedoman dan kriteria penyensoran;
- d) Pemberian surat tanda lulus sensor yang dibubuhkan untuk setiap kopi-jadi film dan iklan film yang dinyatakan telah lulus sensor;
- e) Pembatalan surat tanda lulus sensor;
- f) Pengusulan sanksi administratif kepada pemerintah terhadap pelaku kegiatan perfilman atau pelaku usaha perfilman yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perfilman; dan
- g) Pelaporan kegiatan sensor film dan iklan film baik yang lulus dan yang tidak lulus sensor kepada presiden melalui menteri secara periodik.

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Lembaga Sensor Film. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi

(SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Tahun 2023 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Lembaga Sensor Film. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4 Basis Akuntansi

Lembaga Sensor Film, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan Berbasis akrual Biro Keuangan terdiri dari:

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran

- Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Di samping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

- Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen- komitmen lainnya.

A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang

diterapkan Lembaga Sensor Film Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 *Audited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan entitas pelaporan dari Lembaga Sensor Film.

Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Sensor Film adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - ❖ Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - ❖ Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - ❖ Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada entitas pemerintah pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Music Modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

8) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Music Modern)	4 Tahun

9) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua! Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimpelementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi.

Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Tahun Anggaran 2023 Lembaga Sensor Film telah 9 (sembilan) kali melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan salah satunya realokasi anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19. Rincian revisi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

REVISI KE-	TANGGAL	PAGU
1	7 Maret 2023	43.155.897.000
2	13 April 2023	43.155.897.000
3	08 Juni 2023	43.155.897.000
4	17 Juli 2023	43.155.897.000
5	11 September 2023	43.155.897.000
6	09 Oktober 2023	42.902.457.000
7	17 Oktober 2023	42.902.457.000
8	27 November 2023	42.902.457.000
9	27 Desember 2023	42.902.457.000

Rincian anggaran awal dan anggaran setelah revisi ke-9 adalah sebagai berikut

Tabel 1. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

URAIAN	31 DESEMBER 2023			
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI	NAIK/(TURUN)	
			JUMLAH Rp	%
Pendapatan	-	-	-	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-	0,00%
Jumlah Pendapatan	-	-	-	0,00%
Belanja				
Belanja Pegawai	12.918.219	11.158.354	(1.759.865)	-13,62%
Belanja Barang	26.782.858	28.289.283	1.506.425	5,62%
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	0,00%
Belanja Modal	3.454.820	3.454.820	-	0,00%
Jumlah Belanja	43.155.897	42.902.457	(253.440)	-0,59%

B.1 Pendapatan

B.1.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Lembaga Sensor Film untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 2.916.616.688,-. Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas tarif sensor pelayanan penyensoran film dan iklan film di Lembaga Sensor Film.

Tabel 2. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per Jenis Pendapatan

URAIAN	31 DESEMBER 2023		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	168.169.799	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	2.748.446.889	-
Jumlah	-	2.916.616.688	-

- Realisasi dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha di 31 Desember 2023 sebesar Rp 168.169.799,- berasal dari pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin.
- Realisasi Pendapatan Lain-lain 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.748.446.889,- merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas tarif sensor pelayanan penyensoran film dan iklan film di Lembaga Sensor Film.

*Tabel 3. Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2023	REALISASI 31 DESEMBER 2022	NAIK/(TURUN) Rp	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	168.169.799	-	168.169.799	0,00%
Pendapatan Anggaran Lain-lain	2.748.446.889	2.325.800.154	422.646.735	118,17%
Jumlah	2.916.616.688	2.325.800.154	590.816.534	125,40%

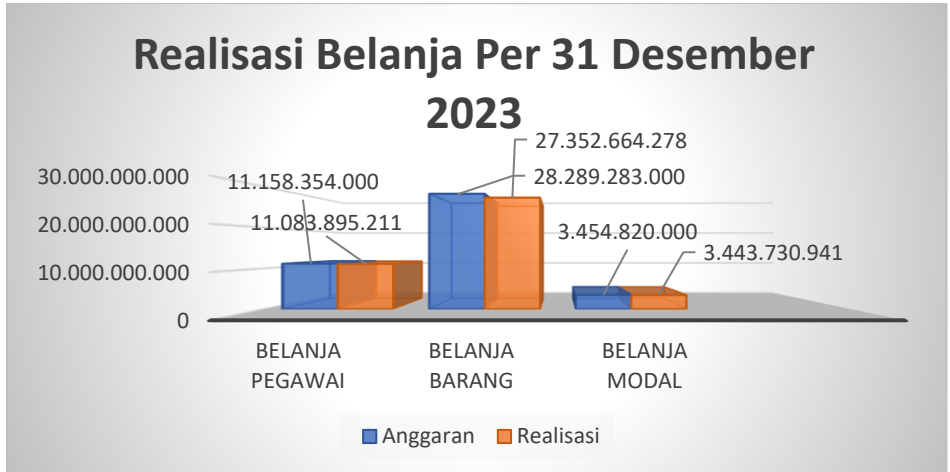
B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.41.880.290.430 atau 97,62%% dari anggaran belanja sebesar Rp.42.902.457.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel 4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN	31 DESEMBER 2023			31 DESEMBER 2022		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	11.158.354.000	11.083.895.211	99,33%	11.454.219.000	11.399.861.961	99,53%
Belanja Barang	28.289.283.000	27.352.664.278	96,69%	17.534.893.000	17.450.303.102	99,52%
Belanja Modal	3.454.820.000	3.443.730.941	99,68%	200.000.000	195.360.000	97,68%
Jumlah	42.902.457.000	41.880.290.430	97,62%	29.189.112.000	29.045.525.063	99,51%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan realisasi Belanja per 31 Desember 2022, Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar (1,89) persen. Hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi perjalanan dinas dan adanya tahapan seleksi anggota dan tenaga sensor Film yang tidak selesai.

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.083.895.211 dan Rp11.399.862.057. Realisasi belanja pegawai 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp315.966.750 atau 2,77% jika dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan:

1. Pada tahun 2023 di satker Lembaga Sensor Film terdapat beberapa pegawai yang pensiun.
2. Pada tahun 2023 juga terdapat Tenaga Sensor Film yang *resign* karena diterima menjadi P3K di instansi lain.

Tabel 5. Perbandingan Rincian Belanja Pegawai
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2023	REALISASI 31 DESEMBER 2022	NAIK/(TURUN) Rp	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.497.661.728	1.694.900.023	(197.238.295)	-11,64%
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	9.572.913.050	9.704.962.034	(132.048.984)	-1,36%
Belanja Lembur	13.321.000	-	13.321.000	0,00%
Jumlah Belanja	11.083.895.778	11.399.862.057	(315.966.279)	-2,77%

Tabel 6. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023			31 DESEMBER 2022		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.507.785.000	1.497.661.728	99,33%	1.734.073.000	1.694.900.023	97,74%
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	9.583.964.000	9.572.913.050	99,88%	9.705.096.000	9.704.962.034	100,00%
Belanja Lembur	66.605.000	13.321.000	0,00%	15.050.000	-	0,00%
Jumlah Belanja	11.158.354.000	11.083.895.778	99,33%	11.454.219.000	11.399.862.057	99,53%

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp27.352.664.278 dan Rp17.450.303.102. Realisasi belanja barang 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp9.902.361.176 atau 56,75% jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 adanya kenaikan anggaran dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 sebesar Rp13.713.345.000

**Tabel 7. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2023	REALISASI 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) Rp	%
Belanja Barang Operasional	2.881.527.195	2.850.441.947	31.085.248	1,09%
Belanja Barang Non Operasional	4.865.205.867	2.234.490.600	2.630.715.267	117,73%
Belanja Barang Persediaan	495.838.221	313.569.755	182.268.466	58,13%
Belanja Jasa	5.636.941.525	4.315.448.200	1.321.493.325	30,62%
Belanja Pemeliharaan	2.529.173.670	1.471.760.300	1.057.413.370	71,85%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	10.076.436.800	5.652.329.300	4.424.107.500	78,27%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	867.541.000	612.263.000	255.278.000	41,69%
Jumlah Belanja	27.352.664.278	17.450.303.102	9.902.361.176	56,75%

**Tabel 8. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

URAIAN	31 DESEMBER 2023			31 DESEMBER 2022		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang Operasional	2.952.984.000	2.881.527.195	97,58%	2.856.445.000	2.850.441.947	99,79%
Belanja Barang Non Operasional	4.956.812.000	4.865.205.867	98,15%	2.242.167.000	2.234.490.600	99,66%
Belanja Barang Persediaan	497.603.000	495.838.221	99,65%	328.948.000	313.569.755	95,33%
Belanja Jasa	5.708.601.000	5.636.941.525	98,74%	4.323.636.000	4.315.448.200	99,81%
Belanja Pemeliharaan	2.669.642.000	2.529.173.670	94,74%	1.491.345.000	1.471.760.300	98,69%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	10.635.547.000	10.076.436.800	94,74%	5.679.177.000	5.652.329.300	99,53%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	868.094.000	867.541.000	99,94%	613.175.000	612.263.000	99,85%
Jumlah Belanja	28.289.283.000	27.352.664.278	96,69%	17.534.893.000	17.450.303.102	99,52%

B.2.3 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.443.730.941 dan Rp195.360.000 Realisasi belanja modal per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.248.370.941 atau 1663% jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan adanya kenaikan anggaran pada belanja modal sebesar Rp3.254.820.000 dari tahun 2022 dikarenakan adanya pembelian peralatan dan fasilitas perkantoran pembelian peralatan dan mesin.

Tabel 9. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2023	REALISASI 31 DESEMBER 2022	NAIK/(TURUN) Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.057.020.816		3.057.020.816	0%
Belanja Modal Lainnya	386.710.125	195.360.000	191.350.125	98%
Jumlah Belanja	3.443.730.941	195.360.000	3.248.370.941	1663%

Selanjutnya rincian perbandingan pagu dan realisasi belanja modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan dalam table berikut ini:

Tabel 10. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Moda
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023			31 DESEMBER 2022		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.057.120.000	3.057.020.816	100,00%			0,00%
Belanja Modal Lainnya	397.700.000	386.710.125	97,24%	200.000.000	195.360.000	97,68%
Jumlah	3.454.820.000	3.443.730.941	99,68%	200.000.000	195.360.000	97,68%

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.057.020.816 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.057.020.816 atau mencapai 100% jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan karena adanya peremajaan peralatan penyensoran berupa DCP Player Projector dan DVD Player di Lembaga Sensor Film sesuai dengan kebijakan.

B.2.3.2 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Modal Lainnya 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp386.710.125 dan Rp195.360.000. Realisasi belanja modal lainnya per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2022 sebesar Rp191.350.125 atau sebesar 97,68%. Hal ini disebabkan karena adanya pembelian Handy Talky, Filling Kabinet, Lemari Arsip, dll

C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

C.1 Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai aset lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing – masing sebesar Rp295.022.375 dan Rp804.140.895. Realisasi per 31 Desember 2023 mengalami penurunan Rincian Aset Lancar sebesar Rp509.118.520 atau 63,31% jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2022. Rincian aset lancar pada satker Lembaga Sensor Film per 31 Desember 2023 tersaji pada table berikut

Tabel 11. Rincian Aset Lancar
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Aset Lancar	REALISASI 31 DESEMBER 2023	REALISASI 31 DESEMBER 2022	NAIK/ (TURUN) Rp	%
1	Kas Lainnya dan Setara Kas	27.544.358	-	27.544.358	0,00%
2	Persediaan	267.478.017	804.140.895	(536.662.878)	-66,74%
Jumlah		295.022.375	804.140.895	(509.118.520)	-63,31%

Selanjutnya dibawah ini dijelaskan rincian per jenis aset lancar sebagai berikut:

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Tidak ada sSaldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 karena seluruhnya sudah disetorkan ke Kas Negara. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran Setelah tanggal pelaporan

No	Rincian	Tanggal Penyetoran	NTPN	Saldo
1	Sisa TUP Desember 2023	29 Desember 2023	C1A4B6QT6PA07KOP	138.152.700
2	Sisa TUP Desember 2023	29 Desember 2023	2B7B845KN9IR0KOM	524.055.782
Jumlah				662.208.482

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Kas Rp27.544.358 dan Rp0.

Rincian sumber Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Keterangan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIKI/(TURUN) Rp	%
1	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran				
a	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	27.544.358	-	-	0%
	Jumlah	27.544.358	-	27.544.358	0%

Penyelesaian Kas Lainnya dan Setara Kas setelah tanggal Neraca hingga tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Penyelesaian Kas Lainnya dan Setara Kas

No	Keterangan	Tanggal	NOMOR NTPN	Jumlah
1	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran			
a	Utang Pajak Bendahara Yang Di Setor Tahun 2024	05 January 2024	3078A5BAQNV200GQ	1.600.000
		05 January 2024	A82201PKOE2L02NQ	1.920.000
		05 January 2024	99AF06707IULI9BT	2.750.000
		05 January 2024	CA6131PKOE2077G6	500.000
		05 January 2024	628985BAQNUDNC4Q	3.850.000
		05 January 2024	B54FC4ETATC2MM1J	700.000
		05 January 2024	919C0745QD3M813K	2.286.900
		05 January 2024	7BA694ETATCHNAVJ	311.850
		05 January 2024	1B139745NAA9THIS	2.972.973
		05 January 2024	BE203745NAAETAK	540.540
		05 January 2024	9C67F4ETATFVT0MN	2.178.000
		05 January 2024	85BE15BAQO2CPVTM	297.000
		05 January 2024	BC4D300PROGLCVV8	49.549
		05 January 2024	4051C5BAQNV0HNII	9.009
		05 January 2024	44F2D00PROJO55UG	4.752.000
		05 January 2024	5E3F5745QD702P3G	648.000
		05 January 2024	DB7F25BAQNV2T9F2	202.500
		05 January 2024	0C94D67OAIHFFLAP	164.000
		05 January 2024	0E4193IFR2QACV3O	37.275
		05 January 2024	0BFBF00PROIR4I1O	1.339.200
		05 January 2024	C53454ETATH3JASB	435.562
	Jumlah		-	27.544.358

C.1.3 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp267.478.017 dan Rp804.140.895 Realisasi

persediaan mengalami penurunan sebesar Rp536.662.878 atau 66,74% jika dibandingkan 31 Desember 2022.

Rincian persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Persediaan
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Persediaan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK/(TURUN) Rp	%
Barang Konsumsi	267.478.017	804.140.895	(536.662.878)	-67%
Barang untuk Pemeliharaan	-	-	-	0%
Suku Cadang	-	-	-	0%
Persediaan Lainnya	-	-	-	0%
TOTAL	267.478.017	804.140.895	(536.662.878)	-67%

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Saldo aset tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.264.686.895 dan 2.226.222.587. Rincian Aset Tetap Satker Lembaga Sensor Film per 31 Desember 2023 tersaji pada table berikut:

Tabel 16. Rincian Aset Tetap
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Aset Tetap	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK/(TURUN) Rp	%
1	Tanah	-	-	-	0,00%
2	Peralatan dan Mesin	59.801.937.914	62.020.046.098	(2.218.108.184)	-3,58%
3	Aset Tetap Renovasi	312.811.175	312.811.175	-	0,00%
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-	0,00%
5	Aset Tetap lainnya	445.958.099	246.658.099	199.300.000	80,80%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	0,00%
	Jumlah	60.560.707.188	62.579.515.372	(2.018.808.184)	-3,23%
	Akumulasi Penyusutan	(56.296.020.293)	(60.353.292.785)	4.057.272.492	-6,72%
	Nilai Buku Aset Tetap	4.264.686.895	2.226.222.587	2.038.464.308	91,57%

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp(56.296.020.293) dan Rp(60.353.292.785). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 59.801.937.914	Rp 56.271.107.793	Rp 3.530.830.121
2	Aset Tetap Lainnya	Rp 758.769.274	Rp 24.912.500	Rp 733.856.774
	Jumlah	Rp 60.560.707.188	Rp 56.296.020.293	Rp 4.264.686.895

C.2.1 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp59.801.937.914 dan Rp62.020.046.098.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 18. Mutasi Peralatan dan Mesin
31 Desember 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	Rp	62.020.046.098
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	2.835.742.816
Mutasi kurang:		
Hibah Keluar	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp	(5.053.851.000)
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	59.801.937.914
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp	(56.271.107.793)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp	3.530.830.121

Mutasi peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 terdiri dari mutasi tambah berupa pembelian DCP Player Projector, DVD Player, Mesin Antrian, Tablet PC, Mesin Absensi, Peralatan Studio Audio Lainnya, Handy

Talky, AC, Dispensi, Kamera sebesar Rp2.835.742.816, koreksi pencatatan Nilai berkurang dan mutasi kurang berupa Penghentiaan Aset Dari Penggunaan sebesar Rp5.053.851.000 berupa mebeulair dan Film Projector.

C.2.2 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp758,769,274 dan Rp559,469,274.

Tabel 19. Mutasi Aset Tetap Lainnya
31 Desember 2023

Saldo per 31 Desember 2022	559.469.274
Mutasi tambah:	-
Pembelian	199.300.000
Mutasi kurang:	
Hibah Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2023	758.769.274
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2022	24.912.500
Nilai Buku per 31 Desember 2023	783.681.774

Mutasi Aset Tetap Lainnya berupa mutasi kurang berupa pembelian alat musik modern sebesar Rp199.300.000.

C.3 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah Rp1,253,316,723 dan Rp 865,754,098. Rincian Nilai Aset lainnya pada tanggal pelaporan tersaji pada table berikut:

Tabel 20. Rincian Aset Lainnya
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK/TURUN Rp	%
1	Aset Tak Berwujud	1.482.639.223	1.095.929.098	386.710.125	35,29%
2	Aset Lain-Lain	6.134.317.725	1.080.466.725	5.053.851.000	467,75%
	Jumlah	7.616.956.948	2.176.395.823	5.440.561.125	249,98%
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(6.363.640.225)	(1.310.641.725)	(5.052.998.500)	385,54%
	Aset lainnya	1.253.316.723	865.754.098	387.562.625	44,77%

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp1,482,639,223 dan Rp1,095,929,098

Aset Tak Berwujud pada Lembaga Sensor Film berupa Pengembangan aplikasi pemantauan, Pengembangan Website, dan Aplikasi Adminstrasi Sensor Berbasis Elektronik (E-Sias) Tahun 2023 yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Mutasi Aset Tak Berwujud
31 Desember 2023

Saldo per 31 Desember 2022	1.095.929.098
Mutasi tambah:	
Pembelian	386.710.125
Mutasi kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2022	1.482.639.223
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(230.175.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	1.252.464.223

Tabel 22. Rincian Aset Tak Berwujud

Jenis Aset Tak Berwujud	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK/TURUN Rp	%
Saldo awal	865.754.098	865.754.098	-	0,00%
Software	230.175.000	230.175.000	-	0,00%
Aplikasi Pemantauan	49.620.000	-	49.620.000	0,00%
Konten Media Sosial	143.620.125	-	143.620.125	0,00%
Website Lembaga Sensor Film	99.345.000	-	99.345.000	0,00%
Aplikasi Administrasi Berbasis Elektronik (E-Sias)	94.125.000	-	94.125.000	0,00%
	1.482.639.223	1.095.929.098	386.710.125	0,00%

C.3.2 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp6.134.317.725 dan Rp 1.080.466.725. Realisasi aset lain-lain per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.053.851.000 dari 31 Desember 2022. Hal ini dikarenakan adanya pencatatan barang yang dihapuskan sebesar Rp5.053.851.000. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Mutasi Aset Lain-Lain

31 Desember 2023

Saldo per 31 Desember 2022	1.080.466.725
Mutasi tambah:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	5.053.851.000
Mutasi kurang:	
Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan)	-
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-
Saldo per 31 Desember 2023	6.134.317.725
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2023	(6.133.465.225)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	852.500

C.3.3 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Uang Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp(6.363.640.225) dan Rp(1.310.641.725). Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset dan Amortisasi Lainnya

Per 31 Desember 2023

No	ASET LAINNYA	Nilai Perolehan	Akumulasi	Nilai Buku
			Penyusutan/Amortisasi Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2023
I	Aset Tak Berwujud			
	Saldo Awal	865.754.098		865.754.098
1	Software	230.175.000	230.175.000	-
2	Aplikasi Pemantauan	49.620.000	-	49.620.000
3	Konten Media Sosial	143.620.125	-	143.620.125
4	Website Lembaga Sensor Film	99.345.000	-	99.345.000
5	Aplikasi Administrasi Berbasis Elektronik (E-Sias)	94.125.000	-	94.125.000
	JUMLAH	1.482.639.223	230.175.000	1.252.464.223
II	Aset Lain-lain			
1	Aset tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	6.134.317.725	6.133.465.225	852.500
	JUMLAH	6.134.317.725	6.133.465.225	852.500
	TOTAL	7.616.956.948	6.363.640.225	1.253.316.723

C.4 Kewajiban

C.4.1 Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

C.4.1.1 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp27.544.358 dan Rp0,-

Saldo utang jangka pendek tersebut sebesar Rp27.544.358 merupakan Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum disetor ke kas Negara dan telah dilakukan penyetoran pada bulan Januari 2024.

Penyelesaian utang jangka pendek lainnya setelah tanggal Neraca hingga tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Penyelesaian utang jangka pendek lainnya

No	Keterangan	Tanggal	NOMOR NTPN	Jumlah
1	Utang Jangka Pendek Lainnya			
a	Utang Pajak Bendahara Yang Di Setor Tahun 2024	05 January 2024	3078A5BAQNV2O0GQ	1.600.000
		05 January 2024	A82201PKOE2L02NQ	1.920.000
		05 January 2024	99AF067O7IULI9BT	2.750.000
		05 January 2024	CA6131PKOE2077G6	500.000
		05 January 2024	628985BAQNUDNC4Q	3.850.000
		05 January 2024	B54FC4ETATC2MM1J	700.000
		05 January 2024	919C0745QD3M813K	2.286.900
		05 January 2024	7BA694ETATCHNAVJ	311.850
		05 January 2024	1B139745NAA9THIS	2.972.973
		05 January 2024	BE203745NAAETAK	540.540
		05 January 2024	9C67F4ETATFVT0MN	2.178.000
		05 January 2024	85BE15BAQO2CPVTM	297.000
		05 January 2024	BC4D300PROGLCVV8	49.549
		05 January 2024	4051C5BAQNV0HNII	9.009
		05 January 2024	44F2D00PROJO55UG	4.752.000
		05 January 2024	5E3F5745QD702P3G	648.000
		05 January 2024	DB7F25BAQNV2T9F2	202.500
		05 January 2024	0C94D67OAIHFFLAP	164.000
		05 January 2024	0E4193IFR2QACV3O	37.275
		05 January 2024	0BFBF00PROIR4I1O	1.339.200
		05 January 2024	C53454ETATH3JASB	435.562
	Jumlah		-	27.544.358

D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

D.1 Kegiatan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada 31 Desember 2023 Lembaga Sensor Film memiliki Pendapatan-LO sebesar Rp2.748.446.889, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp39.769.895.875, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(37.021.448.986). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp(52.860.701) dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(37.074.309.687). Selanjutnya disajikan ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022:

Tabel 26. Ringkasan Perbandingan Laporan Operasional

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK/TURUN	NAIK/TURUN (%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
Jumlah Pendapatan Operasional	2.748.446.889	2.325.800.154	422.646.735	18,17
Jumlah Beban Operasional	39.769.895.875	29.157.624.522	10.612.271.353	36,40
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	(37.021.448.986)	(26.831.824.368)	(10.189.624.618)	37,98
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	168.169.799	-	168.169.799	#DIV/0!
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	221.030.500	-	221.030.500	#DIV/0!
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(52.860.701)	-	(52.860.701)	#DIV/0!
POS LUAR BIASA				
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(37.074.309.687)	(26.831.824.368)	(10.242.485.319)	38,17

D.1.1 Pendapatan

D.1.1.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.916.616.688 dan Rp 2.325.800.154. Rincian pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) Rp	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2.748.446.889	2.325.800.154	422.646.735	18,17%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	168.169.799	-	168.169.799	0,00%
Jumlah	2.916.616.688	2.325.800.154	590.816.534	25,40%

Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas tarif sensor pelayanan penyensoran film dan iklan film di Lembaga Sensor Film sebesar Rp2.748.446.889. Pemungutan tarif sensor tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Sensor Film di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Pelayanan penyensoran tersebut meliputi : Film Nasional, Trailer Nasional, Film Impor, Trailer Impor, Iklan Produk, Televisi, Palwa, Jaringan Informatika, Sarana Promosi, Festival, Kalangan Terbatas, Event, Peninjauan.

Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp.168.169.799,- merupakan Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin.

Pendapatan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp590.816.534 (25,40) persen dari tahun 2022 yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.325.800.154.

D.1.2 Beban

D.1.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai Lembaga Sensor Film pada TA 2023 meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; dan Belanja Vakasi.

Realisasi Beban pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 11.083.895.778 dan Rp 11.399.862.057. Realisasi beban gaji per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 2,77 persen dari beban gaji tahun anggaran 2022. Hal ini disebabkan karena di satker Lembaga Sensor Film terdapat beberapa pegawai yang pensiun juga beberapa Tenaga Sensor Film yang resign karena diterima menjadi P3K di instansi lain.

Tabel 28. Rincian Beban Pegawai

31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2023	REALISASI 31 DESEMBER 2022	NAIK/(TURUN) Rp	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.497.661.728	1.694.900.023	(197.238.295)	-11,64%
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	9.572.913.050	9.704.962.034	(132.048.984)	-1,36%
Belanja Lembur	13.321.000	-	13.321.000	0,00%
Jumlah Belanja	11.083.895.778	11.399.862.057	(315.966.279)	-2,77%

D.1.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban persediaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 860.282.849 dan Rp 189.146.360. Realisasi beban persediaan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp671.136.489 atau 354,82 persen dari beban persediaan tahun anggaran 2022.

Tabel 29. Rincian Beban Persediaan
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) Rp	%
Beban Persediaan Konsumsi	860.282.849	189.146.360	671.136.489	354,82%
Jumlah Beban Persediaan	860.282.849	189.146.360	671.136.489	354,82%

D.1.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban barang dan jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp13.356.646.087 dan Rp9.400.380.747. Realisasi beban barang dan jasa per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.956.265.340 atau 42,09 persen dari tahun anggaran 2022. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan anggaran di Tahun Anggaran 2023

Rincian beban jasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Rincian Beban Barang dan Jasa
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) Rp	%
Beban Keperluan Perkantoran	2.372.012.780	2.274.172.060	97.840.720	4,30%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	218.160.000	177.480.000	40.680.000	22,92%
Beban Barang Operasional Lainnya	158.615.515	104.750.000	53.865.515	51,42%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	132.738.900	294.039.887	(161.300.987)	-54,86%
Beban Bahan	855.344.000	447.992.150	407.351.850	90,93%
Beban Honor Output Kegiatan	424.840.000	189.190.000	235.650.000	124,56%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.536.015.367	1.613.675.450	1.922.339.917	119,13%
Beban Jasa Konsultan	200.000.000	275.000	199.725.000	72627,27%
Beban Sewa	3.841.035.200	224.250.000	3.616.785.200	1612,84%
Beban Jasa Profesi	532.600.000	3.537.336.200	(3.004.736.200)	-84,94%
Beban Jasa Lainnya	1.063.306.325	268.800.000	794.506.325	295,58%
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	21.978.000	268.420.000	(246.442.000)	-91,81%
Jumlah	13.356.646.087	9.400.380.747	3.956.265.340	42,09%

D.1.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.529.367.920 dan Rp1.473.688.925. Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.055.678.995 atau 71,64 persen dibandingkan tahun 2022. Hal ini dikarenakan meningkatnya beban pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin serta Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Rincian Beban Pemeliharaan
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) Rp	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.081.602.600	428.820.000	652.782.600	152,23%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	918.844.370	631.521.100	287.323.270	45,50%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	528.726.700	411.419.200	117.307.500	28,51%
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	194.250	1.928.625	(1.734.375)	-89,93%
Jumlah	2.529.367.920	1.473.688.925	1.055.678.995	71,64%

D.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.943.977.800 dan Rp6.264.592.300. Realisasi beban perjalanan dinas per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.679.385.500 atau 74,70 persen dari beban perjalanan dinas tahun anggaran 2023. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 terdapat kenaikan pada Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota dan Beban Perjalanan Paket Meeting Dalam Kota, dan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Rincian beban perjalanan dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Rincian Beban Perjalanan Dinas

31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) Rp	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	3.602.447.600	1.650.028.900	1.952.418.700	118,33%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	47.400.000	64.890.000	(17.490.000)	-26,95%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.992.110.000	1.171.665.100	1.820.444.900	155,37%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.434.479.200	2.765.745.300	668.733.900	24,18%
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	867.541.000	612.263.000	255.278.000	41,69%
Jumlah	10.943.977.800	6.264.592.300	4.679.385.500	74,70%

D.1.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban penyusutan dan amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp995.726.008 dan Rp429.954.229. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) Rp	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	970.643.008	429.954.229	540.688.779	125,75%
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	24.912.500	-	24.912.500	0,00%
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Berwujud	170.500	-	170.500	0,00%
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	995.726.008	429.954.229	565.771.779	131,59%

D.2 Kegiatan Non Operasional

Pos surplus/defisit dari kegiatan non operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp(52.860.701) dan Rp0. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp(52.860.701) dibanding tahun 2022. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 terdapat aset adanya aset yang telah dihapuskan.

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Rincian Kegiatan Non Operasional
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) Rp	%
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	168.169.799	-	168.169.799	0%
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	0%
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	168.169.799	-	168.169.799	0%
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	0%
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	221.030.500	-	221.030.500	0%
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(221.030.500)	-	(221.030.500)	0%
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(52.860.701)	-	(52.860.701)	-

E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode laporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jumlah Ekuitas Awal per 1 Januari 2023 sebesar Rp3.896.117.580 mengalami kenaikan Ekuitas sebesar Rp1.889.364.055 sehingga jumlah Ekuitas Akhir sebesar Rp5.785.481.635.

Tabel 35. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK/TURUN	NAIK/TURUN %
1	Ekuitas Awal	3.896.117.580	-	3.896.117.580	0,00%
2	Surplus/Defisit - LO	(37.074.309.687)	(26.831.824.368)	(10.242.485.319)	38,17%
3	Transaksi Antar Entitas	38.963.673.742	30.727.941.948	8.235.731.794	26,80%
	EKUITAS AKHIR	5.785.481.635	3.896.117.580	1.889.364.055	48,49%

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 dan 01 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.896.117.580 dan Rp0

E.2 Surplus / Defisit LO

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(37.074.309.687) dan Rp(26.831.824.368).

Tabel 36. Rincian Surplus (Defisit) LO

31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK/TURUN Rp	%
Surplus/Defisit dari kegiatan operasional	(37.021.448.986)	(26.831.824.368)	(10.189.624.618)	37,98%
Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional	(52.860.701)	-	(52.860.701)	0,00%
Pos luar biasa	-	-	-	0,00%
Jumlah	(37.074.309.687)	(26.831.824.368)	(10.242.485.319)	38,17%

E.3 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp38.963.673.742 dan Rp30.727.941.948. rincian transaksi antar entitas terdiri dari:

Tabel 37. Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

Per 31 Desember 2023

No	Jenis Transaksi Antar Entitas	Jumlah
1	Ditagihkan dari entitas lain	41.880.290.430
2	Diterima dari entitas lain	(2.916.616.688)
3	Transfer Masuk	-
Jumlah		38.963.673.742

E.4 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Nilai Penurunan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.889.364.055 dan Rp 3.896.117.580.

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.785.481.635 dan Rp 3.896.117.580.

**Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi,
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023**

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	4	5	6	7=5-6
132111	Peralatan dan Mesin	1.287,	59.801.937.914,	(56.271.107.793,)	3.530.830.121,
30103	ALAT BANTU	2,	38.880.000,	(30.634.286,)	8.245.714,
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	20,	2.218.157.800,	(1.784.657.804,)	433.499.996,
30401	ALAT PENGOLAHAN	7,	44.207.000,	(23.304.626,)	20.902.374,
30501	ALAT KANTOR	106,	2.399.853.696,	(2.271.547.696,)	128.306.000,
30502	ALAT RUMAH TANGGA	475,	5.903.282.341,	(5.594.699.359,)	308.582.982,
30601	ALAT STUDIO	91,	33.465.619.050,	(31.745.313.440,)	1.720.305.610,
30602	ALAT KOMUNIKASI	18,	5.551.372.500,	(5.506.997.500,)	44.375.000,
30701	ALAT KEDOKTERAN	23,	84.277.050,	(74.533.145,)	9.743.905,
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	29,	177.750.000,	(143.625.000,)	34.125.000,
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7,	70.555.000,	(66.123.572,)	4.431.428,
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	10,	11.000.000,	(11.000.000,)	0,
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	5,	121.255.250,	(81.249.000,)	40.006.250,
31001	KOMPUTER UNIT	216,	3.471.384.883,	(3.270.523.266,)	200.861.617,
31002	PERALATAN KOMPUTER	263,	6.154.378.344,	(5.640.990.844,)	513.387.500,
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	15,	89.965.000,	(25.908.255,)	64.056.745,
135111	Aset Tetap Renovasi	15,	312.811.175,	0,	312.811.175,
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	15,	312.811.175,	0,	312.811.175,
135121	Aset Tetap Lainnya	559,	445.958.099,	(24.912.500,)	421.045.599,
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	557,	48.933.099,	0,	48.933.099,
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	1,	197.725.000,	0,	197.725.000,
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	1,	199.300.000,	(24.912.500,)	174.387.500,
162151	Software	3,	230.175.000,	(230.175.000,)	0,
80101	ASET TAK BERWUJUD	3,	230.175.000,	(230.175.000,)	0,
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	31,	1.252.464.223,	0,	1.252.464.223,
80101	ASET TAK BERWUJUD	31,	1.252.464.223,	0,	1.252.464.223,
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	128,	6.134.317.725,	(6.133.465.225,)	852.500,
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	1,	32.000.000,	(32.000.000,)	0,
30501	ALAT KANTOR	22,	235.367.000,	(235.367.000,)	0,
30502	ALAT RUMAH TANGGA	99,	859.888.725,	(859.036.225,)	852.500,
30601	ALAT STUDIO	6,	5.007.062.000,	(5.007.062.000,)	0,
Total			68.177.664.136	(62.659.660.518,)	5.518.003.618,